POLA ALIRAN SUMBERDAYA UNGGULAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN WILAYAH HINTERLAND

(Studi Kasus: Pulau Semau, Propinsi Nusa Tenggara Timur)

TUGAS AKHIR

Oleh:
ROLIVIYANTI JAMIN
L2D 300 376



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005

ABSTRAK

Penerapan konsep pusat pertumbuhan yang digagas oleh ekonom Perroux (1988) di Indonesia telah banyak membawa kemajuan bagi pembangunan di Indonesia, akan tetapi kemajuan pembangunan tersbut hanya dinikmati oleh segelintir wilayah saja terutama wilayah yang dijadikan pusat pertumbuhan, sedangkan wilayah-wilayah belakang lebih banyak tidak bisa menikmatinya. Bahkan ironisnya wilayah belakang bukannya berkembang seperti yang diharapkan bahkan malah terjadi stagnansi atau bahkan mengalami kemunduran. Fenomena ini kemudian menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan pembangunan karena sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan Indonesia yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil tanpa terkecuali.

Fenomena pembangunan di Pulau Semau Propinsi Nusa Tenggara Timur yang notabenenya sebagai Pulau Kecil yang mempunyai tingkat ketergantungan tinggi dengan Pulau induknya (Pulau Timor) mengalami hal yang sama, dimana perkembangan pembangunan di Pulau Semau menunjukkan kondisi yang tersendat-sendat, padahal jika dilihat dari ketersediaan potensi sumberdaya yang ada maka tentunya Pulau Semau bisa berkembang seperti halnya wilayah lain yang berada di Pulau Timor. Mengacu pada fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui merumuskan arahan pengembangan wilayah Pulau Semau dengan melihat potensi ketersediaan sumberdaya unggulan serta pola aliran sumberdaya unggulan yang terjadi baik diantara desa-desa di wilayah internal Pulau Semau maupun pola aliran sumber daya unggulan yang terjadi antara Pulau Semau dengan wilayah pusatnya yakni Kota Kupang dengan harapan dapat diketahui potensi dan permasalahan sehingga tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan karakteristik Pulau Semau.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan ekonomi keruangan, untuk mengetahui potensi unggulan yang tersedia digunakan analisis perbandingan kemampuan produksi antara wilayah Pulau Semau dengan wilayah hinterland lain, untuk mengetahui pola penyebaran secara keruangan digunakan analisis pengelompokkan kemampuan produksi dengan metode Sturgess sedangkan untuk mengetahui pola aliran digunakan dengan analisis deskriptif statistik dengan survei langsung dilapangan, sedangkan untuk mengetahui nilai aliran yang terjadi digunakan pendekatan nilai pengganti dengan memasukkan harga pasar sebagai acuan penilaian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa pola aliran sumberdaya unggulan yang terjadi pada internal Pulau Semau relatif tidak terjadi karena hampir semua kebutuhan baik itu kebutuhan pemasaran hasil sumberdaya unggulan maupun kebutuhan pemenuhan sumberdaya yang tidak tersedia di Pulau Semau dan hampir sepenuhnya dipenuhi dari wilayah Kota Kupang. Kondisi ini praktis menyebabkan wilayah Pulau Semau sulit berkembang meskipun nilai sumberdaya unggulan yang ada di Pulau Semau sangat tinggi. Permasalahan mendasar adalah rendahnya kualitas prasarana dasar yang ada di internal Pulau Semau (jalan lingkungan yang semua merupakan jalan tanah, pasar sebagai tempat koleksi dan distribusi yang terdapat di Desa *Uitao dengan jangkauan pelayanan hanya 4 desa).*

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut maka selain upaya pengoptimalan hasil produksi sumberdaya unggulan yang ada, kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang juga harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan prasarana dasar wilayah terutama peningkatan kualitas jalan tanah menjadi jalan aspal guna mempermidah hubungan antar desa serta menambah jumlah pasar sehingga bisa melayani kebutuhan masyarakat sehingga interaksipenduduk dan pola aliran sumberdaya diinternal wilayah bisa optimal. Sedangkan pada upaya peningkatan kualitas interaksi dengan wilayah Kota Kupang maka dibutuhkan adanya moda transportasi laut yang bisa mengangkut kendaraan roda 4, sehingga kendaraan roda 4 bisa masuk di Pulau Semau dengan demikian maka upaya pengoptimalan pembangunan wilayah Pulau Semau bisa tercapai.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan konsep pusat pertumbuhan yang digagas oleh ekonom Perroux (1988) di Indonesia telah banyak membawa kemajuan bagi pembangunan diIndonesia, akan tetapi kemajuan pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir wilayah saja terutama wilayah yang dijadikan pusat pertumbuhan, sedangkan wilayah yang tidak berfungsi sebagai wilayah pusat (wilayah belakang) lebih banyak tidak bisa menikmatinya, bahkan ironisnya wilayah belakang bukannya berkembang seperti yang diharapkan tetapi terjadi stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran. Fenomena ini kemudian menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan pembangunan karena sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan Indonesia yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil tanpa terkecuali.

Masalah ketimpangan ekonomi *antar*daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa melainkan juga antar kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan *antar*dearah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai (Majidi,1997). Kondisi ini sejalan dengan pendapat Tim P4N – UGM dan Bappeda Tingkat 1 Jawa Tengah (1997) mengatakan Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena kekurangan sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki kelengkapan fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perbankkan juga tenaga kerja yang terampil, disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kuncoro 2004: p.127).

Dalam konteks regional, khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur proses ketimpangan atau kensenjangan antara wilayah pusat pertumbuhan dan belakangnya juga terjadi. Kota Kupang sebagai wilayah pusat pertumbuhan untuk sub wilayah pengembangan I (Pulau Timor dan sekitarnya) secara fisik mengalami perkembangan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain yang dijadikan sebagai wilayah belakang. Indikator kesenjangan ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Kota Kupang pada 2 tahun terakhir yang mengalami

peningkatan sebesar 3,30% naik dari 6,01% pada tahun 2003 menjadi 9,31% pada tahun 2004, sedangkan di wilayah Kabupaten Kupang pertumbuhan ekonomi pada 2 tahun terakhir hanya mampu mencapai angka 0,32% saja naik dari 5,5% pada tahun 2003 menjadi 5,90% pada tahun 2004. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel I.1.

TABEL I.1
PERBANDINGAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH
KOTA KUPANG DAN KABUPATEN KUPANG

Tohun	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (%)		
Tallull	Kabupaten Kupang	Kota Kupang	
2003	5,58	6,01	
2004	5,90	9,31	

Sumber: Indikator Ekonomi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, 2004

Dalam studi ini, wilayah Pulau Semau merupakan salah satu bagian dari wilayah hinterland Kota Kupang yang secara geografis berupa pulau sendiri dan terpisah dengan dengan Pulau Timor dimana wilayah Kota Kupang terintegrasi. Yang dalam perkembangan wilayahnya juga mengalami hal serupa dengan fenomena-fenomena ketimpangan pembangunan seperti yang dijelaskan diatas. Dimana indikator pendapatan penduduk perkapita di Pulau Semau sangat kontras dengan pendapatan perkapita penduduk Kota Kupang pada tahun 2004, yakni Rp. 2.573.883 *versus* Rp. 6.399.970. Lebih jauh lagi, ketersedian prasarana wilayah terutama prasarana dasar penunjang pembangunan seperti prasarana jalan. Kondisi prsarana jalan yang terdapat di Pulau Semau secara keseluruhan merupakan jalan tanah dan ini sangat kontras dengan kondisi prasarana jalan yang terdapat pada wilayah-wilayah di Pulau Timor yang semuanya relatif sudah berkonstruksi aspal, indikator ketimpangan pembangunan lain juga ditunjukkan oleh rendahnya ketersediaan prasarana lain seperti ketersediaan prasarana pendidikan yang hanya sampai pada tingkat SMP saja.

Fenomena ini jika dikaitkan dengan keberadaan Pulau Semau sebagai salah satu wilayah hinterland Kota Kupang yang secara geografis terpisah dari Pulau Timor (Kota Kupang) dengan jarak tempuh 15 menit menggunakan kapal motor tempel atau 45 menit dengan menggunakan sampan kecil non mesin "jukung" secara internal mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah dengan jenis yang beragam, terutama untuk komoditas tertentu seperti: bawang merah, kacang tanah, rumput laut, cumi-cumi dan daging sapi, dimana komoditas ini mendapat perlakuan sendiri di pasar Kota Kupang dengan harga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan komoditas yang sama dari wilayah lain di pasar Kota Kupang, dengan banyak dan beragamnya potensi sumberdaya alam ini tentunya pembangunan di wilayah Pulau Semau tidak seharusnya terjadi seperti saat ini. Perkembangan pembangunan di Pulau Semau yang lambat dan terasa tersendat-sendat tersebut semakin menarik untuk dikaji, karena secara ekonomi wilayah tingkat

pendapatan wilayah Pulau Semau jika dibandingkan dengan pendapatan wilayah hinterland Kota Kupang lainnya menunjukkan pendapatan wilayah Pulau Semau relatif lebih tinggi. Seperti terlihat dari **Tabel I.2** berikut.

TABEL I.2 PERBANDINGAN TINGKAT PENDAPATAN WILAYAH PULAU SEMAU DENGAN WILAYAH HINTERLAND KOTA KUPANG LAINNYA TAHUN 2004

No	Wilayah Hinterland Kota Kupang	PDRB Kecamatan (Rp.)	Pendapatan Per Kapita (Rp.)
1.	Kupang Barat	61.812.111	2.602.327
2.	Semau	27.002.522	2.573.883
3.	Kupang Tengah	72.435.047	2.118.417
4.	Kupang Timur	79.200.490	1.780.226
5.	Sulamu	27.609.317	2.028.201

Sumber Kabupaten KupangDalam Angka, 2004

Berdasarkan data tingkat pendapatan Pulau Semau yang mampu menduduki posisi ke 2 dari wilayah hinterland lain menunjukkan bahwa keberadaan potensi sumberdaya alam yang ada di Pulau Semau pada dasarnya sangat potensial untuk mendukung perkembangan wilayah Pulau Semau. Adanya potensi sumberdaya yang melimpah tentunya harus mempunyai saluran distribusi yang baik agar nilai sumberdaya tersebut bisa memperoleh hasil yang optimal. Mengacu pada fenomena Pulau Semau yang relatif terbelakang dengan ketersedian prasarana wilayah yang minim serta keterbatasan geografis yang ada, maka akan sangat menarik untuk mengkaji bagaimana pola aliran sumberdaya yang terjadi dalam upaya peningkatan perekonomian wilayah Pulau Semau dalam konstalasinya sebagai wilayah hinterland. Untuk mengetahui pola aliran sumberdaya unggulan tersebut maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai potensi sumberdaya unggulan apa yang layak dikembangkan di Pulau Semau serta dimana sentra-sentra produksinya.

1.2 Rumusan Permasalahan

Seperti dijelaskan di atas bahwa keberadaan sumberdaya alam yang melimpah di Pulau Semau sangat kontras dengan kondisi pembangunan yang terjadi di Pulau Semau saat ini, dimana ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang jauh dari kata "layak" terutama kondisi prasarana jalan sebagai instrumen interaksi antar wilayah internal sangat jauh dari kata layak, jumlah prasarana perdagangan yang minim yang sepertinya Pulau Semau kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kupang mengingat kondisi dan ketersediaan prasarana dasar wilayah di kecamatan lain pada wilayah Kabupaten Kupang yang terletak di Pulau Timor relatif lebih baik. Berdasarkan fenomena tersebut maka tentunya akan sangat menarik untuk mengkaji kenapa wilayah Pulau Semau tidak bisa berkembang padahal ketersedian sumberdaya terutama